

**KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

(Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**YULIDA LEZA
NPM : 1421020236**

Progam Studi : Siyasah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

**KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

(Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**YULIDA LEZA
NPM : 1421020236**

Progam Studi : Siyasah

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Dr. Siti Mahmudah, S.ag., M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Kepemimpinan adat Saibatin mempunyai ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisional yang menganut pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang berdasarkan garis keturunan (Monarki). Dalam kepemimpinan adat Lampung Saibatin untuk mendapatkan gelar adat mesti memenuhi syarat-syarat seperti mempunyai garis keturunan Saibatin, anak laki-laki tertua, beragama Islam, sudah menikah atau baligh. Selain itu untuk menduduki struktur kepemimpinan adat Saibatin mempunyai kelipatan 4 (empat), setiap jenjang atau tingkat adat sebelumnya mesti mempunyai minimal 4 pemapah gelar adat. Alasannya karena kedudukan adat mesti diwariskan secara turun temurun, jika sang ayah keturunan Saibatin dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu maka sang anak memegang tumpuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannya pun diakui.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kepemimpinan adat Saibatin dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari masyarakat yang dianggap mempunyai untuk dimintai keterangan dan para Saibatin Pekon Pagar Dalam. Sedangkan data Sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan pustaka.

Hasil dari penelitian ini dari sisi tinjauan pandangan fiqh siyasah tentang kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam terdapat beberapa kesenjangan dengan kepemimpinan perspektif fiqh siyasah. Alasannya bahwa kepemimpinan adat Saibatin termasuk kedalam sistem pemerintahan Monarki, di mana pemimpin tertinggi dapat naik tahta tanpa berdasarkan pilihan rakyat atau masyarakat melainkan melalui suksesi secara turun temurun dan dikelompokkan dalam bentuk stratifikasi sosial yang bersifat tertutup, apalagi kekuasaan tertinggi dalam sistem Monarki berada di tangan seorang raja. Kepemimpinan adat Saibatin merupakan kepemimpinan yang tidak membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin adat. Sebab dalam kepemimpinan Islam tidak ada keharusan calon pemimpin dari keturunan pemimpin sebelumnya, namun Islam juga tidak melarang untuk calon pemimpin itu boleh dari keturunan pemimpin sebelumnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul : Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Pagar
Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)**
Nama : Yulida Leza
NPM : 1421020236
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II


Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196706041997032004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**


Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

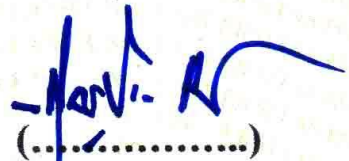
Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Judul Skripsi: **Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh **Yulida Leza**, NPM. 1421020236, Jurusan Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah pada hari **kamis tanggal 12 Juli 2018**:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.


(.....)

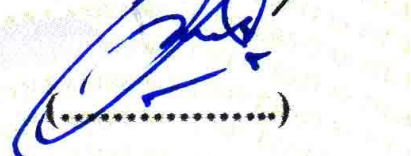
Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.


(.....)

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.


(.....)

Penguji II : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59).¹



¹ Q.S. An-Nisa (4) : 59.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk mereka yang aku sayang:

1. Yang ku Hormati, yang ku sayangi dan yang ku banggakan Ayah dan Ibu tercinta Bpk Hapzon dan Ibu Maryati yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang takterbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada ayah dan ibu.
2. Untuk kakak-kakak ku yang tercinta Wo Yevi Hapriza, Udo Yudi Irawan, Ngah Yunda Soleha dan kakak-kakak iparku Temudo Deni Stiawan, Wo Susanti, Abang Feri Iskandar. Yang tidak pernah bosan memberikan motivasi kepadaku untuk senantiasa semangat dalam menempuh pendidikan dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya.
3. Untuk keponakan-keponakan ku Raisya Hanjani, Rayhan Azora, Ghatan Alvaro, Satria Kurniawan, Sendi Algavi. Kehadiran kalian dikehidupan Uncu mendatangkan kebahagiaan dan kalian adalah salah satu yang membuat Uncu bersemangat untuk menggapai cita-cita.
4. Untuk Kakek dan Nenekku tercinta Yusirwan dan Maisaroh terima kasih atas do'a dan nasihat dan semangat yang telah kalian berikan.
5. Untuk Mat Khairuddin S.H, sahabat-sahabat dan teman-temanku. Terima kasih atas semangat dan dukungannya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yulida Leza dilahirkan di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 06 Oktober 1995, merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Hapzon dan Ibu Maryati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sumur Jaya, Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat lulus tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Jati Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat lulus tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri Biha Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat lulus tahun 2014.
4. Pada Tahun 2014 Penulis Melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah program studi Siyasah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan .
4. Drs. Haryanto H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
10. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Pagar Dalam yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kepada tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta masyarakat Pekon Pagar Dalam yang telah banyak membantuk untuk terselesainya skripsi ini.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaiakan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 2018
Penulis

Yulida Leza
1421020236

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
 BAB II KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	 16
A. Pengertian Kepemimpinan	16
B. Dasar Hukum Kepemimpinan.....	22
C. Kreteria Calon Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah	30
D. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah.....	31
E. Peran Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah.....	44
F. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan.....	48
 BAB III KEPEMIMPINAN ADAT SAIBATIN DI PEKON	
PAGAR DALAM	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Bentuk Kepemimpinan Adat Saibatin.....	55

C. Struktur Kepangkatan Adat Saibatin.....	60
D. Kreteria Pemimpin Adat Saibatin	62
E. Mekanisme Pengangkatan Adat Saibatin.....	63
F. Peran Pemimpin Adat Saibatin	66

BAB IV ANALISA DATA KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG

SAIBATIN PERSFEKTIF FIQH SIYASAH 68

A. Bentuk Kepemimpin Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam	68
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	71

BAB V PENUTUP.....77

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Peratin Pekon Pagar Dalam	50
2. Luas Wilayah	52
3. Jumlah Penduduk	53
4. Mata Pencaharian	54
5. Tingkat Pendidikan	55



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulisan skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau defenisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **KEPEMIMPINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Peseisir Barat)**. Judul terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Kepemimpinan adalah sebuah seni kemampuan mempengaruhi prilaku manusia dan kemampuan mengendalikan orang lain agar prilaku mereka sesuai dengan yang diinginkan.²
2. Adat juga diartikan sebagai tata cara hidup, kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang lazim ditaati dan dilakukan secara turun temurun.³
3. Lampung Saibatin adalah suku Lampung yang memiliki satu junjungan dimana hanya ada satu raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Kedudukan adat ini turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga Saibatin.⁴

²Sunindhia dan Ninik Widyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h.56.

³Hilman Adi Kusuma Dkk, *Adat Masyarakat Lampung* (Kanwil Dekdikbuk Propinsi Lampung, 1990), h.4.

⁴Sabarudin Sa, *Lampung Pepadun dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012), h.141.

4. Perspektif berarti tinjauan, sudut pandang atau pandangan.⁵
5. Fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.⁶
6. Siyasah mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengaturan dan kebijaksanaan, pengaturan dan pengendalian. Siyasah juga bisa diartikan sebagai pemerintahan dan politik.⁷

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap masalah kepemimpinan adat Lampung Saibatin dimana adat tersebut hanya memiliki satu junjungan atau raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Kedudukan adat ini turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga Saibatin.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih judul “Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan adat Saibatin jika ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.93.

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulala Ar Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.14.

⁷*Ibid.*, h.25.

2. Permasalahan yang diteliti sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas syari'ah dan hukum jurusan siyasah.
3. Belum ada yang memilih judul proposal ini di fakultas syari'ah dan hukum jurusan siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Pemimpin adalah seluruh aktivitas atau kegiatan untuk mempengaruhi serta menggerakkan orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan.⁸ Sikap adil dan bijaksana merupakan tujuan utama dari sebuah kepemimpinan. Pada dasarnya, semua komunitas membutuhkan pemimpin. Keharusan membentuk pemimpin mulai dari kesadaran manusia bahwa mereka membutuhkan panutan, teladan, pengarah dan pengayom untuk menjaga tatanan sosial manusia.⁹ Menjadi pemimpin adalah sebuah amanah yang akan diminta pertanggung jawabannya, baik oleh orang yang menggangkatnya maupun di hadapan Illahi. Ketika seorang pemimpin menyadari dirinya adalah bagian dari rakyat, maka ia akan merasa bahwa dirinya adalah pelayanan yang bekerja pada rakyat. Pemimpin untuk semua rakyat, berdiri diatas dan untuk semua golongan, suku dan warna. Walaupun seorang pemimpin diangkat dari suatu golongan tertentu, namun dalam kepemimpinannya ia akan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana.¹⁰

⁸ Abdul Qodir Djailani, *Perjuangan Idiologi Islam Indonesia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h.60.

⁹ Riberu J, *Dasar-DasarKepemimpinan, Pedoman Ilmu Jaya* (Jakarta: 2005), h.15.

¹⁰ Ahmad Sofyan, *Islamon Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), h.2.

Eksistensi sebuah komunitas tertentu tergantung pada pola kepemimpinan yang diterapkan oleh penguasa. Pada zaman kerajaan, pola kepemimpinan yang diterapkan adalah pola kepemimpinan Monarki, dan akhir-akhir ini disebut dengan pola kepemimpinan tradisional. Dalam Kepemimpinan tradisional atau sekarang sering disebut kepemimpinan adat proses pelimpahan kekuasaan berdasarkan pada warisan dari keturunan ayah, maka sang anak laki-laki tertua akan memegang kepemimpinan setelahnya dan hak-hak keturunanpun diakui, oleh karena itu kepemimpinan tradisional atau kepemimpinan adat diterima oleh kelompoknya.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Berbagai suku dan kebudayaan tersebut tersebar di Indonesia dan hidup dengan berkelompok ada yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan, bahkan pedalaman. Dari beraneka ragam tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah dalam melangsungkan kehidupan.

Salah satu suku masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat ini merupakan salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Masyarakat ini mendiami daerah Pesisir Propinsi Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah Persebaran Suku Saibatin yaitu Labuhan Meringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda,

Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Barat, Ranau, Matapura, Muara Dua, Kayu Agung.¹¹

Budaya suku Saibatin cenderung bersifat Monarki karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Kedudukan adatnya turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua, jika sang ayah keturunan Saibatin dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anakpun memegang tumpuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannyapun diakui. Struktur kepemimpinan adat setiap komonitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komonitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat Pekon Pagar Dalam, pangkat adat tertinggi adalah bergelar Raja. Sedangkan struktur kepangkatan adat Lampung Saibatin terdiri dari *Sultan atau bisa disebut juga Pangiran atau Dalom, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas, Mas/Inton*.

Proses pelimpahan wewenang dalam kepemimpinan adat Saibatin mempunyai ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisioanal yang menganut pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang berdasarkan garis keturunan. Dalam kepemimpinan adat Lampung Saibatin untuk mendapatkan gelar adat harus memenuhi syarat-syarat seperti mempunyai garis keturunan Saibatin, anak laki-laki tertua, beragama Islam, sudah menikah atau baliqh. Selain itu untuk menduduki

¹¹ Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai* (Jakarta: Cita Insane Madani, 2012), h.23.

struktur kepemimpinan adat Saibatin mempunyai kelipatan 4 (empat), setiap jenjang atau tingkatan adat sebelumnya harus mempunyai minimal 4 pemapah gelar adat, seperti untuk bergelar *Sultan* sebelumnya harus membawahi minimal empat gelar *Raja*, begitu juga seterusnya untuk bergelar *Raja* minimal harus membawahi empat gelar *Batin*, untuk bergelar *Batin* harus membawahi minimal empat gelar *Radin*, untuk bergelar *Radin* harus membawahi minimal empat gelar *Minak*, untuk bergelar *Minak* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Kimas*, untuk bergelar *Kimas* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Mas* atau *Inton*.

Sementara kepemimpinan menurut fiqh siyasah selain prinsip adil, bijaksana, kepercayaan dan persamaan, kepemimpinan juga mempunyai prinsip *syura* (musyawarah). Dengan bermusyawarah kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada satu tujuan yang universal. Strategi untuk mencapai tujuan beragam sehingga musyawarah bukan hendak menyalpkan perbedaan pendapat melainkan dan kepentingan umum, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energy yang besar untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dapat juga disinonimkan dengan Khalifah, Imamah, dan Ulil amri.

Menurut Ahmadi Sofyan, Pemimpin adalah seorang yang harus mampu menjadi pelayan dan pemandu. Pelayan pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya, maka ia wajib memberi kesejahteraan bagi pengikutnya (rakyat). Pemandu pemimpin adalah pemandu yang member pengarahan pada

pengikutnya untuk menunjukan jalan yang terbaik bagi penguikutnya agar selamat sampai tujuan.¹²

Hal tersebut di atas merupakan suatu sikap sekaligus peran yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin sebagai langkah untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang dapat menjadi suritauladan bagi rakyatnya, dan tanda-tanda kepemimpinan yang demikian terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasidin. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kepemimpinannya menggunakan sendi-sendi akhlakul karimah.

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* pada regenerasi pemimpin, mencontohkan sikap persamaan, baik hak dan kewajiban, martabat serta kesempatan sebab dalam Islam kepemimpinan bukanlah dari golongan elit, melainkan semua muslim diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karenanya nilai-nilai musyawarah dalam Islam cukup dikedepankan. Hal ini terlihat jelas setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada proses pengangkatan *Khulafaur Rasyidin*, yang berdasarkan ketentuan Syar'i dan suritauladan yang diterapkan sebelumnya. Agar apa yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* dapat dilaksanakan di zaman sekarang, maka pemimpin harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu Islam, laki-laki, baligh dan berilmu.¹³

Pembahasan di atas, terlihat beberapa perbedaan antara kepemimpinan adat yang diterapkan di masyarakat adat Lampung Saibatin. perbedaan yang

¹² *Ibid.*, h.31.

¹³ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husaen Haykal* (Jakarta: Paramadina, 2001), h.228.

dimaksud adalah penerapan bentuk dan kriteria calon pemimpin pada adat Lampung Saibatin dan kepemimpinan dalam dalam fiqh siyasah. Kepemimpinan adat Lampung Saibatin harus menurut garis keturunan. Sementara kepemimpinan dalam tinjauan fiqh siyasah tidak memberikan batasan dan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua kaum muslim asalkan memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan di atas, dan pada proses pengangkatannya pun tidak dengan cara yang berlebihan, melainkan dengan cara sederhana dan dengan nuansa kerakyatan.

Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai kepemimpinan adat Lampung Saibatin dalam perspektif fiqh siyasah di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Kepemimpin Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam ?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis: diharapkan penelitian ini untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kepemimpinana adat, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Tata Negara dan Politik (Siyasah) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di falkultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
- b. Secara praktis: diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam, memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang ini.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode *kualitatif*. Alasannya, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengkaji tentang kepemimpinan adat yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang ada dan dikaji secara mendalam untuk mengetahui bentuk kepemimpinan adat Lampung Saibatin di Pekon Pagar Dalam menurut pandangan fiqh siyasah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁴ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara

¹⁴ Kartini Kartano, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Manadr Maju, 1996), h.3.

faktual dan cermat.¹⁵ Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinpresentasikan kemudian disimpulkan.¹⁶

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan.¹⁸ penelitian ini dalam menentukan sampel digunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemimpin adat dan pemangku adat yang lainnya, yang turut aktif dalam acara adat yang ada dimasyarakat Pekon Pagar Dalam.

¹⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h.105.

¹⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.42.

¹⁸ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Angkasa, 1995), h.54.

Pertimbangan ini karena tidak semua orang yang dari keturunan Saibatin dan pemangku adat paham dengan adat. Adapun jumlah sampelnya adalah sebanyak 6 orang.

- 2) Warga yang dinilai mempunyai untuk dijadikan sampel, dalam hal ini yang bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti diambil dari warga yang bertempat tinggal asli di tempat penelitian. Adapun jumlah sampelnya adalah 5 orang. Jumlah sampel semuanya adalah $6 \text{ orang} + 5 \text{ orang} = 11 \text{ orang}$.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari hasil *Interview* (wawancara) dan *library riserch* yang diperoleh dari buku-buku fiqh siyasah, Al-Qur'an dan Hadist yang ditulis oleh para Ahli. Wawancara dengan para masyarakat atau sekelompok warga, tokoh adat yang memberikan keterangan tentang adat Saibatin dan data-data yang tepat dari lokasi penelitian yaitu di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁹ Observasi ini dilaksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang disampaikan oleh responden. Jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kepemimpinan adat Lampung Saibatin di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Figh Siyasa.

b. Metode *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁰ Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.8.

²⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, h.187.

untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini digunakan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.²¹ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Pekon Pagar Dalam ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah, dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.
- b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²²

²¹ Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineck Cipta, 2006), h.231.

²² Amiruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode *Kualitatif* yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat *Deskriptif Kualitatif*, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan adat Lampung Saibatin perspektif fiqh siyasah. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir *Induktif* yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³

²³ Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995, h.32.

BAB II

KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pengertian Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan Secara Umum

Pengertian tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap, dan pemimpin mulai dari zaman Nabi hingga saat ini.¹ Dalam Islam kata pemimpin identik dengan istilah Imamah, Khalifah dan Ulil Amri.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) untuk memengaruhi orang lain (pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain bertingkahtaku sebagaimana pemberani berperang.² Kata Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur ataupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan baik dari segi kata maupun makna.³

Kepemimpinan menurut istilah yang umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk

¹ Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.7.

² Ngalim Purwanto Dkk, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Mutiara, 1994), h.38.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.250.

mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.⁴ Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penguasaan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan kelompok organisasi.

Sedangkan Kepemimpinan dari segi Bahasa, berasal dari kata *Leadership* (Kepemimpinan), kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori sifat. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin, artinya kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan.⁵

Kepemimpinan lebih memiliki arti luas, pemimpin merupakan spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap sebagai pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisi melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.⁶ Menurut Veithzalrifai pemimpin yang efektif adalah yang bersikap luwes, sadar mengenai diri kelompok dan situasi, memberi tau bawahan setiap persoalan dan bagaimana pemimpin pandai dan bijak menggunakan wewenangnya mahir menggunakan pengawasan umum dimana bawaan tersebut mampu dan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan.

⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: rajawali press, 1998), h.39

⁵ *Ibid.*, h.3-4.

⁶ Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.196.

2. Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. secara bahasa pengertian fiqh adalah paham atau mendalam, sedangkan menurut istilah yaitu ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat alamiah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci.⁷ Pengertian ini dapat dipahami bahwa fiqh siyasah adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian fiqh siyasah diantaranya: menurut Muhammad Iqbal fiqh siyasah adalah bagian dari pemahan ulama mujtahid tentang hukum yang Syari'at yang berhubungan dengan kenegaraan. Dalam hal ini beliau juga berpendapat bahwa fiqh siyasah juga merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Grop, 2014), h.2.

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.⁸

Menurut Abdul Wahab Khalaf fiqh siyasah adalah bagian ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan peraturan Islam.⁹

Dari uraian diatas bahwa fiqh siyasah memegang peranan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan Islam akan sulit sekali terjamin. Terkait masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah tetapi untuk urusan masyarakat, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah.

Kata kepemimpinan dalam fiqh siyasah yaitu Imamah atau Khalifah yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi Negara dan mengatur kemaslahatan hidup, sekelompok Ulama berpendapat status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.¹⁰

⁸ *Ibid.*, h.3.

⁹ Beni Ahmad Seabani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Cv Pustaka Stia, 2005), h.18.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Qisthi Pers, 2015), h.9.

Terkait dengan hal ini ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan: *Pertama*, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang ia miliki, dan perspektif weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan kepemimpinan pada prosedur hukum disebut otoritas hukum. *Kedua*, tipe kepemimpinan tradisioal yang didasarkan kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seorang pemimpin ditentukan adat kebiasaan lama yang dipraktikan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu. *Ketiga*, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang. Di dalam sperspektif weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya tersebut otoritas kharismatis.¹¹

Dalam mempelajari fiqh siyasah ada beberapa metode yang dipergunakan sebagai acuan, diantaranya ialah:

1. Metode Ijtihad;
2. Pendekatan Qiyas;
3. Pendekatan Ijma;
4. Pendekatan Ihtihsan;
5. Pendekatan Mashlahah Mursalah;
6. Pendekatan Istishhab;
7. Pendekatan *Urf* (Hukum Adat).

Dalam hal ini dikatakan dengan teori kepemimpinan, setiap pemimpin Islam selalu mengacu pada semua metode di atas dalam mengambil suatu

¹¹ Surahman Amin, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Study Al-Quran, Vol1 No 1 (Oktober 2015), h.28.

kebijakan maupun dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mengacu pada beberapa metode dan pendekatan di atas yang menjadi dasar atau landasan berfikir dan bertindak seorang pemimpin dalam Islam lebih kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

Sedangkan teori kepemimpinan sendiri berawal dengan tindakan seorang pemimpin yang meninggalkan catatan-catatan sejarah yang dibukukan. Maka teori kepemimpinan siyasah merupakan sebuah tindakan seorang pemimpin Islam dalam hal ini semasa Rosulullah SAW, beserta penerusnya tentunya yang mengacupada Al-Quran dan Sunnah sebagai sebuah dasar dan meninjau dari tujuh metode pendekatan yang penulis paparkan di atas.

Dalam fiqh siyasah terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain daripada berpegang teguh dengan landasan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) yaitu kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip musyawarah.¹²

Jika berbicara mengenai sejarah mungkin yang patut dijadikan contoh atau tauladan bagi kita ataupun bagi setiap pemimpin dalam memimpin masyarakat atau umat adalah Rosulullah SAW. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin Negara. Dengan sifat amanah, fatonah, tablig, sidiq beliau dan kemudian diteruskan oleh khulafaur Ar-rasydin sebagai generasi

¹² Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.123-126.

estafet kepemimpinan umat Islam selanjutnya (*Khalifah*). Ia dinamakan Khalifah (pengganti, wakil) karena ia bertugas menggantikan dan mewakilkan peran Rosulullah SAW dalam memimpin umat beliau. Ia dapat dipanggil dengan sebutan “Khalifah Rosulullah” atau biasanya dapat dipanggil dengan sebutan “Khalifah”.¹³

B. Dasar Hukum Kepemimpinan

Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah pemimpin ini setelah wafatnya Rosul, Para Sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam mencari pemimpin umat Islam. Pentingnya persoalan pemimpin ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam.

Allah telah memberitahukan kepada manusia, tentang pentingnya peran pemimpin dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya:

Q.S. An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S. An-Nisa (4) : 58)

¹³ Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, h.36.

Q.S An Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa : 59).¹⁴

Ayat 58 diturunkan kepada para penguasa, mereka harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya (Ahlinya), jika mereka memutuskan perkara diantara manusia harus seadil-adilnya. Adapun ayat 59 turun kepada orang-orang yang dipimpin, seperti tentara dan lainnya, mereka harus menaati penguasa, melaksanakan amanah dari pemimpin, taat dalam pembagian ghanimah, pemutus perkara dalam berbagai peperangan dan lain-lain. Tetapi mereka tidak boleh taat kepada pemimpin yang memerintah kepada kemaksiatan. Jika mereka berselisih paham dalam suatu hal, maka hendaklah mereka mengembalikannya kepada Kitabullah dan Sunnah Rosulnya.

Dalam Islam menjadi pemimpin dan dipimpin adalah amanah yang pasti akan diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak. Membangun pemerintah yang baik menurut ayat ini bukan hanya peran penguasa akan tetapi rakyat juga ikut menentukan arah pemerintahan tersebut. Karena bagaimana mungkin suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik jika hanya pemimpinnya saja yang taat

¹⁴ Q.S An-Nisa (4) : 58-59.

membangun sistem sedangkan rakyatnya melawan sistem yang memerintahkan kepada maksiat.

Oleh karena itu menurut ayat di atas ada 5 syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintah yang baik, yaitu:

1. Pemberian jabatan (amanah) kepada orang terbaik (ahlinya)
2. Membangun hukum yang adil
3. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat
4. Ketaatan tidak boleh dalam kemaksiatan
5. Konstitusi yang berlandaskan Al-Quran dan Ass-sunnah

Didalam Islam kepemimpinan identik dengan sebuah *Khalifah* yang berarti wakil atau pengganti, istilah ini dipergunakan setelah wafatnya Rosulallah SAW namun juga merejuk kepada pirman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-baqarah (2): 30).¹⁵

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah (2) : 30.

Kata *Khalifah* dalam ayat tersebut tidak hanya ditunjukan kepada para Khalifah sesudah Nabi, tetapi juga kepada semua Manusia yang ada di bumi ini yang bertugas memakmurkan bumi ini. Kata lain yang dipergunakan yaitu *Ulil Amri* yang mana kata ini satu akar dengan kata Amir sebagaimana disebut di atas. Kata *Ulil Amri* berarti pemimpin tertinggi di dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri),kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”(Q.S. An-Nisa (4) : 83).¹⁶

Dijelaskan pula dalam fiqh siyasah terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain daripada berpegang teguh dengan landasan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) yaitu sebagai berikut:

(1) kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT (2) prinsip keadilan, (3) prinsip persamaan (musyawarah), dan (4) prinsip musyawarah.¹⁷

¹⁶ Q.S. An-Nisa (4) : 83.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah-Temininologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasydun*, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h.123-126.

1. Kedaulatan Tertinggi ditangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua Umat-Nya wajib mengikuti Undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rosul-Nya dan kemudian ketaatan kepada Ulil Amri diantara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan pada Q.S An-Nisa (4) : 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa (4) : 59).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ٱللَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
 خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah (5): 8).¹⁸

(Q.S. An-Nisa (4) : 58) yang berbunyi:

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْتُمُ ٱلْعَجَلَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَنْتُمْ
 ظَالِمُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa (4): 58).¹⁹

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial yang bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun norma hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusi terhadap hukum pada umumnya meliputi

¹⁸ Q.S. Al-Maidah (5) : 8.

¹⁹ Q.S. An-Nisa (4) : 58.

harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa barasan waktu. Oleh karena itulah manusia mengharapkan hal-hal dibawah ini:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan oranglain;
- b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar;
- c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda;
- d. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan;
- e. Kebebasan berekspresi, pendapat, bertindak, dengan Tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial, regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

3. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-ha yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Hujarat (49) : 10), yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:orang-Orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara itu dan takutkanlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujarat (49): 10).²⁰

²⁰ Q.S. Al-Hujarat (49): 10.

4. Prinsip Musyawarah

Musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak menyingkapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.

Firman Allah SWT. Q.S. Asy Syura (42) : 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy Syura (42) : 38).²¹

²¹ Q.S. Asy Syura (42) : 38.

Dan dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran (3) : 159).²²

C. Kreteria Calon Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Kreteria atau syarat menjadi seorang pemimpin yang disebut para fuqoha berbeda-beda sesuai perbedaan zamannya. Bila ada yang mengira bahwa ini adalah termasuk dalam syari'at umum dan lazim bagi umat sampai hari kiamat, maka sebenarnya tidaklah demikian. Syarat-syarat ini termasuk salah satu fiqh (pemahaman) yang harus selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan kondisi dan zaman.

Menurut Imam Al-Mawardi Kreteria untuk menjadi seorang pemimpin memiliki tujuh poin penting, dan tujuh dari point-point ini adalah untuk menjadi sebuah acuan syarat penting bagi seorang pemimpin yang akan mencalonkan diri atau yang akan dipilih oleh rakyat.

“Kreteria atau syarat bagi seorang calon pemimpin diantaranya:

1. Keseimbangan (al-'adalah) yang memenuhi semua kreteria.
Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
2. Memiliki panca indra yang lengkap dan sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung mengenai persoalan yang diketahuinya.

²² Q.S. Ali Imran (3) : 159.

3. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
4. Visi pemikiran yang baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kepentingan mereka.
5. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
6. Mempunyai nasab dari suku quraisy, berdasarkan nash dan ijma".²³

Sementara menurut Imam Al-Haramain Al-Juaini mensyaratkan bahwa:

"calon pemimpin saat ini tidak harus dari golongan Quraisy ataupun dari golongan pemimpin sebelumnya, karena syarat ini merupakan masalah yang diperselisihkan. Maka tidak boleh membuat statement pasti, apalagi masalah ini adalah lapangan ijtihad tidak boleh mutlak-mutlakan".²⁴

Lebih lanjut menurut Ibn Khaldun menyatakan bahwa:

"mengapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa pemimpin itu dari golongan Quraisy, karena Quraisy waktu itu merupakan suku yang kuat, tangguh dan terkemuka, mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh yang membuat mereka paling berwibawa memelihara keutuhan dan perstuan umat Islam. Pemimpin seperti yang berasal dari golongan demikian mampu mengurus kelompoknya dengan efektif, tetapi jika ada salah satu suku, kelompok atau seseorang yang bisa melebihi atau sama seperti kelompok Quraisy maka berhak pula memegang kepemimpinan. Karena menurut Ibn Kaldun syarat itu hanya merupakan simbolis dan hak kepemimpinan bukanlah hak monopoli Quraisy serta harus adanya persamaan hak".²⁵

D. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Perspektif Fiqh Siyasah

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam teori politik Islam dianggap persoalan yang paling mendasar. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantiannya itu dilakukan. Oleh sebab itu oleh sejarah Islam, dikenal dengan berbagai mekanisme penetapan kepala Negara (Pemimpin) dan tentu saja dengan kriteria yang sesuai dengan sosiohistoris yang ada.

Sahnya jabatan kepala Negara (Pemimpi) terwujud dengan dua cara:

²³ Al-Mawardi, Al-Ahkamsulthaniyah, *Op.Cid.*, h.18.

²⁴ Sayuti Pulangan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), h.256.

²⁵ *Ibid.*, h.59.

1. Menurut kelompok syi'ah pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat
2. Menurut golongan sunni pengangkatan pemimpin berdasarkan pilihan umat atau yang lazim disebut syura. Alasannya karena tidak adanya nash yang *qotn 'I* tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai umat Islam dan karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah syura.²⁶

Lebih rinci Abu Zahroh, menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara:

1. Melalui Pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang.
2. Pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya.
3. Pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa penguasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.²⁷

Ketiga pola kepemimpinan di atas, mengacu pada proses pengangkatan masa *Khulafaur Al-Rasyidin*, Dalam kasus *Khulafaur Al-Rasyidin*, sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan berdasarkan “pemilihan suatu musyawarah terbuka”, Umar bin Al-Khattab “ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala

²⁶ Musdah mulia, *Negara Islam: pemikiran politik Husain Haykal* (jakaata: paramadina, 2001), h.228.

²⁷ *Ibid.*, h.229.

Negara terdahulunya (dengan cara bermusyawarah)”, Ustman bin Al-Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dalam suatu dewan pramatur”, dan Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan “Pemilihan berdasarkan musyawarah dalam pertemuan terbuka”.²⁸

Menengok kembali sejarah peradaban Islam setelah wafatnya Rosulullah, sekaligus kepemimpinan khulafaur Ar-Rasydin dianggap cocok dengan pembahasan ini. Napak kilas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan Khulafaur rasydin:

1. Kepemimpinan Rosulullah

Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam Negara diletakan dasar-dasar Islam maka turunlah ayat-ayat Al-Qur'an pada preode ini untuk membangun legaliats dari sisi-sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rosulullah dengan perkataan dan tidakannya. Hiduplah Kota Madinah dengan sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidalitas yang erat diantara anggota masyarakatnya. Dengan demikian berarti bahwa, ini masyarakat Islam pertama yang dibangun oleh Rosulullah dengan asas-asas yang abadi. Secara sistematik, proses peradapan yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yatrib adalah: *pertama* Nabi Muhammad mengubah nama Yatrib menjadi Madinah (*Madianat Ar-Rosul, Madinah An-Nabi, Atau Madinah Al-*

²⁸ Dzazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.17.

Munawwarah), perubahan nama yang tidak secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju, dan berperadaban; *kedua* membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual saja, tetapi juga menjadi sarana penting mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping hal tersebut masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan; *ketiga*, Nabi membentuk kegiatan *munakhath* (persaudaraan), yaitu mempersatukan kaum muhajirin (orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yatsrib). Dengan Anshar (orang-orang yang menerima dan membantu kedatangan muhajirin ke Yatsrib). Persaudaraan diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Muhammad membentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan seagama, disamping satu persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu suatu bentuk persaudaraan darah; *keempat*, membentuk persaudaraan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam; dan *kelima* Nabi Muhammad membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Bagian kelima inilah yang dianggap sangat penting, karena pada masa itu peradaban bangsa Arab yang masih menggunakan hukum rimba, yakni siapa yang kuat ia yang akan berkuasa. Maka dengan peperangan fisik mereka melakukannya demi tercapai tahta dan kekuasaan yang mereka inginkan.

Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana pergantian kepemimpinan setelah ditinggalkannya. Beliau tampaknya menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang dikalangan masyarakat Arab dan ajaran Demokrasi dalam islam. Dalam perkembangan selanjutnya, proses suksesi kepemimpinan poliitik dalam sejarah Islam berbeda-beda dari satu masa kemasa yang lain. Ada yang berlangsung aman dan damai, tetapi sering juga melalui konflik dan pertumpahan darah akibat ambisi takterkendali dari pihak-pihak tertentu setelah Nabi wafat, terjadi pertentangan pendapat antara kaum muhajirin dan anshor dibalai kota bani Sa'idah di madinah. Masing-masing golongan berpendapat bahwa kepemimpinan harus berada dipihak mereka, atau setidaknya masing-masing golongan mempunyai pemimpin sendiri. Akan tetapi, karena pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah, ukhuwah yang tinggi, peradaban itu dapat diselesaikan.

2. Kepemimpinan Masa Al-khulafaur Al-Rasyidin

a. Masa Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq

Sehari setelah Rosulullah wafat, kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsaqifah Bani Sa'idah. Mereka sibuk membicarakan siapa yang akan diangkat menjadi Khalifah mengati kekuasaan politik Nabi. Dalam pertemuan itu, suku khazraj menunjukan Sa'ad Ibn 'Ubadah sebagai Khalifah, namun suku Aws belum bersedia menerimanya pencalonan Sa'ad tersebut, karena mereka juga

mempertimbangkan kemungkinan golongan muhajirin menentukan calonnya sendiri. Menghadapi keberatan suku Aws, sebagian suku Khajraz bersikukuh pada penderian mereka, meskipun kaum muhajirin juga akan mempertahankan pemimpin dari kalangan mereka.

Sementara orang-orang Anshar masih berkumpul di Tsaqfah bani Sa'ad. 'Umar, Abu 'ubaidah Ibn Jarrah dan beberapa kaum Muslimin lainnya juga sibuk membicarakan wafatnya Rosul. Sedangkan Abu bakar, 'Ali serta keluarga Rosul sibuk mengurus persiapan pemakaman jenazah beliau. Ketika itu Umar mulai berfikir tentang umat Islam setelah Nabi wafat. Umar langsung meminta 'Abu 'Ubaidah untuk mengeluarkan tangannya untuk dibaia'at. 'Umar melihat Abu Ubaidah adalah figur yang cocok untuk menjadi Khalifah, karena dia kepercayaan umat. Namun 'Abu 'Ubaidah keberatan dengan alasan bahwa Abu Bakar-lah figur yang lebih tepat untuk menggantikan Nabi.

Setelah terpilih menjadi Khalifah mengkatintikan Rosulullah, 'Abubakar menyampaikan pidato kenegaraan, pidato pelantikan ini memperlihatkan garis kebijakanyang akan ditempuh oleh Abu Bakar sebagai nahkoda baru Negar Madinah. Hal-hal penting yang dapat dicatan dalam pidato ini adalah: *pertama*, pelantikan Abu Bakar dapat dikatankan sebagai kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyatnya. *Kedua*, karena itu Abu Bakar meminta kepada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan control terhadap dirinya. *Ketiga*, tekad Abu Bakar untuk menegakan keadilan dan HAM dengan

melindungi orang-orang yang lemah dari kesewenang-wenangan orang yang kuat. *Keempat*, seruan untuk membela Negara pada saat dibutuhkan. *Kelima*, perintah untuk menjalankan Shalat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.

Pada tahun ketiga pemerintahannya, Abu Bakar mendadak jatuh sakit, kemudian 'Abu Bakar perlu member wasiat tentang penggantinya kelak maka Abu Bakar menetapkan 'Umar bin 'Khatab sebagai Khalifah, dalam penetapan ini Abu Bakar tetap melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Diantara sahabat-sahabat yang diajak musyawarah adalah 'Abd Al-Rahman ibn 'Awf dan 'Usman ibn 'Affan serta ibn Khudaid.

Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih 'Umar, 'Abu Bakar bertanya, "apakah kalian semua rela menerima orang kelak memimpin kamu? Demi Allah, sesungguhnya aku kelak tidak akan melupakan pemikiran ku dan tidak memilih kerabatku sebagai penggantikku untuk memimpin kamu, aku mengangkat Umar. Karena itu dengar dan patuhilah dia." Para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Abu Bakar.

Selanjutnya Abu Bakar memanggil 'Umar kemudian membekalinya dengan beberapa pesan. Kemudian Umar pun di bai'at secara umum oleh umat Islam di masjid Nabawi.²⁹

²⁹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.50-62.

b. Masa Khaifah Umar Ibn Al-Khathab

Setelah bai'at menjadi Khalifah, 'Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip, 'Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang ditempuh 'Abu Bakar, namun karena permasalahan yang dihadapi 'Umar semakin berkembang seiring dengan perluasan daerah Islam, 'Umar melakukan berbagai kebijaksanaan yang antisifatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya. Kebijakan yang dilakukan 'Umar sebagai kepala Negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara reguler yang digaji oleh Negara.

Luasnya daerah kekuasaan Islam ini membuat 'Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Khalifah 'Abu Bakar sebelumnya. 'Umar mengadakan pembaharuan signifikan dalam bidang administrasi Negara. Dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam, 'Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior untuk tidak meninggalkan kota Madinah. 'Umar membutuhkan tenaga mereka untuk member masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota "Majelis Syura" sebagai teman musyawarah atau penasehat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik.

Dalam masalah suksesi 'Umar menempuh cara yang berbeda dengan 'Abu Bakar sebelumnya, setelah mengalami luka parah akibat tikaman budak Persia bernama Abu Lu'luah, para sahabat merasa khawatir kalau-kalau 'Umar meninggal dunia dan tidak sempat meninggalkan pesan tentang penggantinya. Ini bisa membahayakan umat Islam, mengingat trauma Tsaqifah Bani Sa'idah masih belum hilang dari umat Islam. Mulanya 'Umar menolak memenuhi permintaan sahabat-sahabat tersebut. Menurutnya orang yang pantas menduduki jabatan puncak menggantikannya sudah lebih dahulu meninggal. Di antara sahabat kemudian mengusaulakan agar 'Umar menunjuk putranya 'Abdullah menjadi penggantinya. Mendengar permintaan ini 'Umar pun marah dan menegaskan cukup hanya seorang 'Umar dari keluarganya yang mendapatkan menjadi pemimpin umat Islam. Akhirnya sahabat pun pulang dari rumah 'Umar dengan perasaan kecewa.

Namun mengingat bahaya perpecahan semakin semakin kelihatan bahwa 'Umar tidak meninggalkan wasiat tentang penggantinya, para sahabat mengunjungi 'Umar lagi dan mendesaknya agar menunjuk pengganti. 'Umar pun tidak bisa mengelak dari permintaan tersebut. Hanya saja, 'Umar tidak menunjuk langsung seseorang sebagai penggantinya, seperti yang dilakukan Abu Bakar kepada dirinya. 'Umar memilih enam sahabat senior yang terdiri dari 'Usman, 'Ali, 'Abd Al-Arahman ibn 'Awf, Thalhah ibn 'Ubaidillah, 'Zubeir ibn 'Awwam,

Sa'd ibn Abi Waqqas, dan putranya sendiri 'Abdullah. Mereka inilah "tim formatur" yang akan menunjuk siapa diantara mereka yang akan menjadi Khalifah. Namun 'Umar menggaris bawahi bahwa putranya tidak boleh dipilih, disitu juga 'Umar menjelaskan aturan main pemilihan Khalifah. 'Umar pepesan bahwa lima atau empat orang sepakat untuk memilih seseorang untuk menjadi Khalifah dan satu atau dua orang membangkang, maka yang membangkang tersebut dipenggal lehernya. Kalau suara berimbang 3:3, maka keputusan akan diserahkan kepada Abdullah ibn 'Umar. Tapi kalau keputusan ibn 'Umar juga tidak disepakati, maka yang menjadi Khalifah adalah calon yang dipilih oleh kelompok 'Abd al- Rahman ibn 'Awf. Kalau ini tidak disetujui juga, penggal saja leher orang yang membangkang tersebut.

Setelah 'Umar wafat dan dimakamkan, mulailah tim formatur mengadakan musyawarah. Sejak semula, jalannya musyawarah ini benar-benar alot dan ketat. Masing-masing ingin menduduki jabatan Khalifah. 'Abd al- Rahman ibn 'Awf menawarkan ada di antara anggota musyawarah yang mengundurkan diri, namun tak ada seorangpun yang bersedia. Akhirnya 'Abd al-Rahman sendiri yang memulainya. Setelah itu, 'Abd al-Rahman melobi anggota lainnya. Ia menyatakan kepada 'Usman tentang siapa yang menjadi Khalifah, seadanya ia tidak terpilih. 'Usman menjawab: 'Ali. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Zubeir dan Sa'd secara terpisah. Keduanya

menjawab: 'Usman. Ketika Ali disodorkan pertanyaan yang sama, jawaban yang diberikan juga adalah 'Usman.

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat ditarik polarisasi kekuatan yaitu 'Ali dan 'Usman. Polarisasi ini juga mengkristal dalam masyarakat Madinah. Selanjutnya 'Abd al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan seandainya ia terpilih menjadi Khalifah, sanggupkan ia melaksanakan tugas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah serta kebijaksanaan 'Abu Bakar dan 'Umar sebelumnya. 'Ali karena kepolosannya hanya menjawab bahwa ia berharap dapat menjalankannya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Setelah itu 'Abd al-Rahman 'Usman dan menyodorkan pertanyaan serupa, 'Usman pun menjawab "Ya Sanggup". Akhirnya 'Usman dibai'at menjadi Khalifah ketiga dalam usia 70 tahun.³⁰

c. Masa Khalifah 'Usman ibn 'Affan

Pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilaksanakan 'Usman adalah mencoba mengacu kepada kebijakan Khalifah Abu Bakar dan 'Umar. Seperti halnya 'Umar, 'Usman juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam.

Inilah gambaran beberapa kebijaksanaan politik 'Usman dalam mengelola Negara Islam. Pada awal pemerintahannya kebijaksanaan politik 'Usman tidak mengalami tantangandan protes dari umat Islam. Usman dapat mengelola berbagai kepentingan dengan baik. Namun ini

³⁰ *Ibid.*, h.63-75.

hanya bejalan selama enam tahun pertama pemerintahannya. Pada enam tahun kedua, 'Usman mulai diterpa badai protes dan ketidak pusan rakyat dari berbagai daerah. Banyak kebijaksanaannya yang tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah. Setidaknya terdapat tiga sumber ketidak puasan umat Islam terhadap 'Usman, sehingga menimbulkan kekacauan dalam pemerintahannya. tiga hal tersebut adalah sosial politik, pendaya gunaan kekayaan Negara, dan kebijaksanaan keimigrasian.

Dari sistem pemerintahan yang dijalankan 'Usman ini dapat dikemukakan beberapa catatan. *Pertama*, 'Usman lebih mengutamakan kaum keluarganya untuk menduduki jabatan penting adalah karena kepercayaan yang terlalu besar kepada mereka. *Kedua*, hal ini yang tak kalah pentingnya adalah kebijakannya memberikan izin kepada Sahabat-sahabat senior untuk meninggalkan Madinah. Menyebarnya Sahabat-sahabat ke berbagai daerah menyebabkan control terhadap 'Usman semakin berkurang. *Ketiga*, besarnya arus oposisi dari berbagai daerah terhadap pemerintah usman dapat di pahami dalam konteks berbedanya perlakuan yang mereka alami antara pemerintahan Umar dan Usman. Pada masa 'Umar rakyat merasakan keadilan dan hak mereka di perhatikan, bahkan mereka dapat secara langsung menyampaikan kontrol dan kritik baik terhadap 'Umar sendiri sebagai Khalifah. 'Umar sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Sementara dalam pemerintahan 'Usman, rakyat melihat pola hidup pejabat-pejabat Negara yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap mereka. Klimaksnya adalah

peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Usman ditangan umat Islam sendiri.³¹

d. Masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib

Setelah pembunuhan ‘Usman, para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubeir dan Za’d ibn Abi Waqqash untuk dibai’at menjadi Khalifah. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka menoleh kepada ‘Ali pada awalnya pun Ali tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang Badar (sahabat senior). Menurutny orang yang didukung oleh komonitas inilah yang lebih berhak menjadi Khalifah. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha’I melakukan bai’at dan diikiti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubeir.

Hal pertama yang dilakukan Ali setelah menjabat sebagai Khalifah memberhentikan Gubernur-gubernur yang di angkat ‘Usman sebelumnya dan menarik kembali tanah yang dibagi-bagikan oleh ‘Usman kepada kerabatnya. ‘Ali juga mengirim surat kepada gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewaan rakyat. ‘Alipun menyusun Undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, ‘Ali menegaskan pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat kepada pejabat di daerah, ‘Ali juga menyebar mata-mata (intel).

³¹ *Ibid.*, h.77-85.

Dalam sikap egalitarian, ‘Ali mencontohkan sikap seorang kepala Negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. ‘Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa ‘Umar dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha ‘Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya dari pada kesatuan dan persatuan. Akhirnya praktis selama pemerintahannya, ‘Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan diberbagai daerah.³²

Menurut Husain Haykal, bahwa:

*“dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun cara pengangkatan Khalifah Rasyidin dapat dijadikan rujukan umat Islam, sebab masa-masa setelahnya tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melaksanakan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin banyak menggunakan ijtihad”.*³³

E. Peran Pemimpin Menurut Fiqh Siyash)

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (Habluminallah), maupun hubungan dengan manusia (Habluminnas), termasuk diantaranya masalah kepemimpinan dipemerintahan. Karena kepemimpinan merupakan suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, dan baik. Tugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana, Karena itu pula dalam menunjuk seorang pemimpin bukanlah berdasarkan golongan

³² *Ibid.*, h.85-88.

dan kekerabatan semata, tetapi lebih mengutamakan keahlian, profesionalisme, dan keaktifan.

Kepemimpinan disatu sisi dapat bermakna kekuasaan. Kata kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan Allah SWT, mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya.

Kita merasa urgensi dan pentingnya pemimpin yang efektif melalui beberapa poin, salah satunya ialah kepemimpinan harus ada dalam kehidupan sehingga kehidupan bisa teratur dengan rapi, keadilan bisa ditegakan dan kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah bisa dihalang-halangi. Serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada disekitarnya dan memanfaatkan perubahan untuk kepentingan organisasi mengembangkan, melatih, dan menjaga anggota.³⁴

Adanya kesadaran seorang mu'min terhadap hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadiannya, ketika ia memegang kekuasaan, ia akan bersikap rendah hati, tidak ada sikap keangkuhan dalam dirinya sedikitpun, tidak akan menyelewengkan kekuasaannya dalam bentuk apapun, dan ia gunakan kekuasaannya tersebut sebagai alat untuk menghambakan dirinya dan alat untuk mencapai ridha Allah SWT. Sehingga ia akan betul-betul melaksanakan amanah dan tanggung jawab jabatan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, bukannya untuk memenuhi

³⁴ As-Suwaidan, Thariq Muhammad dan Faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan* (Jakarta: Gema Insane Press, 2005), h.53-56.

kepentingan pribadi maupun golongan-golongan tertentu saja. Karena dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya pemimpin yang mengatur, membawahi, dan mengarahkan kehidupan masyarakat itu. Pemimpin harus menjadi abdi masyarakat, dia harus melayani dan menjadi fasilitator bagi keperluan-keperluan rakyat.

Dalam Islam hampir semua Ulama menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah (Titipan) yang setiap saat harus dipertanggung jawabkan dan diambil wewenangnya, amanah itu diperoleh dari Allah SWT lewat pemilihan yang dilakukan oleh Manusia, kecuali para Nabi dan Rosul yang langsung dipilih oleh Allah. Oleh karena itu dalam melaksanakan amanah, Manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggung jawab. Jika Manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temanya sendiri, atau memaksakan diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata.

Pemimpin atau penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan disegala bidang. Ia akan mempertanggung jawabkan semua kebijakan yang diambil sewaktu di dunia menyangkut persoalan Umat. Apabila adil, jujur, dan benar maka Allah merahmatinya, tetapi jika dzalim dan menyelewengkan kekuasaanya, maka Allah akan melaknatnya, dan jika pemimpin itu sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahkan.

Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah:³⁵

1. Menjaga agama agar berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah.
2. Menjalankan hukum kepada dua pihak yang bertikai, dan memutuskan permusuhan antara pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
3. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
4. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang dan binasa.
5. Menjaga daerah-daerah dengan bentang yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna untuk merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
6. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam.

³⁵ Al-Mawardi, *Op.Cit.*, h.37-38.

7. Menarik *fai-I* dan memungut zakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mall (kas Negar) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat pejabat-pejabat terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya menjalankan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna.
10. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang terpercaya dapat saja menjadi penghianat dan orang-orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.

B. Pendapat Ulama Tentang Bentuk Kepemimpinan

Pada dasarnya kemimpin yang diinginkan oleh suatu Negara yaitu pemimpin yang bijaksana, merakyat, berpendidikan dan satu kepercayaan dengan masyarakat, agar tidak ada yang namanya kesalah pahaman serta tidak adanya perbedaan kepercayaan antara pemimpin dengan masyarakat.

1. Al-Ghazali berpendapat bahwa: ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpin yang ditaati. Oleh karena itu agama dan pemimpin adalah saudara kembar atau agama adalah

sendi dan pemimpin adalah pengawalnya, sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan sia-sia.³⁶

2. Ibn Khaldun berpendapat bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada Syara' dan ijma' sahabat dan tabi'in. mengingat bahwa para sahabat bersegera membai'at Abu Bakar setelah Rosulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu masyarakat dibiarkan dalam keadaan tidak berpemimpin, semuanya merupakan ijma yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.
3. Abu Zahroh menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dengan tiga cara: *pertama* melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang, *kedua* pengangkatan atau penunjukan dari Khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya, *ketiga* pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih salah satu diantara mereka. Pola kepemimpinan ini mengacu pada proses pengangkatan masa Khulafaur Rasydin.³⁷

³⁶ Imam Ahmad Bin Hambal, Mushab Imam Ahmad Bin Hambal, Juz II, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Libanon, 1993, h.238.

³⁷ Musdah mulia, *Op.Cit.*, h.228.

BAB III

KEPEMIMPINAN ADAT SAIBATIN DI PEKON PAGAR DALAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pekon Pagar Dalam

Pekon Pagar Dalam adalah salah satu Pekon yang berada di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 1957 Pekon Pagar Dalam sudah memiliki kepala kampung yang bernama Ahmad Padel. Pekon tersebut pecahan dari Bumi Lebu Tenumbang, dimana pada waktu itu Pekon Pagar Dalam disebut Pekon Tuha. Oleh pembagian dari pimpinan *Marga Tenumbang* yang dulu bernama Pasirah, dipimpin oleh suku Raja yang ada di Pekon Pagar Dalam yang bernama Hamdan *Gelakh Raja Mantri* sebagai pimpinan adat di Pekon Pagar Dalam yang kemudian setelah ia wafat sekarang digantikan oleh keturunannya yang bernama Liswandi hingga sekarang.¹

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Tabel 1
Daftar Nama-nama Peratin Pekon Pagar Dalam

No	Nama	Masa Jabatan
1	Ahmad Padel	1959-1967 (Depenitif)
2	Hasan Basri	1967-1975 (Depenitif)
3	Mahyudin	1975-1983 (Depenitif)
4	Nasrudin	1983-1991 (Depenitif)

¹ Amri Jaya (Peratin), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam , 30 Maret 2017.

5	Sobri Malik	1992-1997 (Depenitif)
6	Khotman Azhari	1997-1999 (Pjs)
7	Basran	1999-2000 (Pjs)
8	Sahidin	2000-2005 (Depenitif)
9	Tambat Yuzirwan	2005-2006 (Pjs)
10	Sahidin	2007-2014 (Depenitif)
11	Radin Mat Hasan	2014-2015 (Pjs)
12	Rusli	2015-2016 (Pjs)
13	Amri Jaya	2016 hingga sekarang

Sumber: Monografi Pekon Pagar Dalam Tahun 2017

3. Keadaan Geografis dan Demografis Pekon Pagar Dalam

a. Letak Pekon Pagar Dalam

Pekon Pagar Dalam adalah salah satu dari Pekon yang berada di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pekon Pagar Dalam berjarak 20 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.²

b. Batas Wilayah Pekon Pagar Dalam

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tanjung Jati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Tanjung Setia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sumur Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Samudra Hindia

² Zulyan, wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 30 Maret 2017.

c. Luas Wilayah

Pekon Pagar Dalam merupakan salah satu Pekon yang tergolong sedang wilayah jika dibanding dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Pekon tersebut. Luas Pekon Pagar Dalam adalah 768,5 Hektar yang terbagi dalam tujuh bagian. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel:

Tabel 2
Luas wilayah

No	Nama	Luas wilayah
1	Pemukiman	215 Hektar
2	Lahan Pertanian	235 Hektar
3	Lahan Perkebunan	278 Hektar
4	Kuburan	1,5 Hektar
5	Pekarangan	8 Hektar
6	Hutan	25 Hektar
7	Rawa	6 Hektar
Jumlah Keseluruhan		768.5 Hektar

Sumber: monografi pekon pagar dalam tahun 2017

d. Keadaan Demografis Pekon Pagar Dalam

Jumlah Penduduk Pekon Pagar Dalam Yang terdapat didata kependudukan tahun 2017 berjumlah 635 jiwa yang kemudian diklasifikasikan menurut usia penduduk, mulai dari 0 bulan sampai usia 65 tahun keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 12 bulan	5	2	7
2	1 - 5 tahun	26	25	51
3	6 - 10 tahun	33	30	66
4	11 - 15 tahun	32	27	59
5	16 - 20 tahun	29	24	53
6	21- 25 tahun	33	21	54
7	26 - 30 tahun	30	27	57
8	31 - 35 tahun	24	14	38
9	36 - 40 tahun	29	26	55
10	41 - 45 tahun	20	22	44
11	46 - 50 tahun	24	31	55
12	51-60 tahun	22	21	43
13	61-65 tahun	20	16	36
14	65 keatas	29	18	47
Jumlah keseluruhan		354	281	635

Suber: monografi Pekon Pagar Dalam tahun 2017

4. Keadaan Sosial dan Kemasyarakatan

a. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Penduduk Pekon Pagar Dalam sebagian besar berpropesi sebagai petani dan nelayan dan beberapa masyarakat berpropesi sebagai pedagang, pengrajin, peternak dan sebagai pegawai Negeri sipil. Hal tersebut dapat dilihat pata tabel di bawah ini:

Tabel 4
Mata Pencanharian Penduduk

No	Mata Pencanharian	Jumlah
1	Petani	306
2	Nelayan	170
3	PNS	4
4	Pengrajin	5
5	Pedagang	16
6	TNI/POLRI	1
7	Peternak	73

Sumber: Monografi Pekon Pagar Dalam tahun 2017

b. Agama dan Pendidikan

1) Agama

Masyarakat Pekon Pagar Dalam seluruh penduduknya beragama Islam. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa yasinan untuk laki-laki dan pengajian ibu-ibu. Selain itu ada juga syukuran orang melahirkan, pernikahan, khitanan, dan tahlilan yang bertujuan mengirim do'a buat orang yang sudah meninggal dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dengan kerabat, tetangga dan masyarakat serta untuk peribadahan khususnya. Di Pekon Pagar Dalam terdapat satu buah Masjid dan satu buah Taman Pendidikan Al-Qur'an.³

³ Khotman Azhari, wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 1 April 2017.

2) Pendidikan

Berikut adalah uraian tingkat pendidikan Masyarakat Pekon Pagar

Dalam:

Tabel 5
Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Belum sekolah	47
2	SD Tapi Tidak Tamat	27
3	Tamat SD	95
4	Tidak Tamat SMP/Sederajat	83
5	Tamat SMP/Sederajat	96
6	Tidak Tamat SMA/Sederajat	124
7	Tamat SMA/Sederajat	58
8	Sedang Sekolah	96
9	D1	4
10	D2	2
11	D3	-
12	S1	3
13	S2	-
Jumlah Keseluruhan		635

Sumber: Monografi Pekon Pagar Dalam tahun 2017.⁴

B. Bentuk Kepemimpinan Adat Saibatin

1. Pengertian Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan Adat adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi

⁴ Monografi Pekon Pagar Dalam Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat tahun 2017

mencapai beberapa tujuan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, yang keberadaannya tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakan berlakunya, melainkan ia hadir berdasarkan atas kehendak orang-orang atau kelompok tertentu, dan hal ini sudah merupakan tradisi adat istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh kelompok dan masyarakat setempat.

2. Sejarah Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam

Masyarakat adat Lampung Saibatin juga biasa disebut Lampung Pesisir. Asal-usul Lampung Pesisir merupakan suatu arti dari penyebaran penduduknya melalui pesisir pantai, dengan perkembangan yang demikian penduduk ini dikenal dengan nama Pesisir. Masyarakat ini mendiami daerah Pesisir Propinsi Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat.

Adat Saibatin di pekon pagar dalam berasal dari Marga tenumbang, Pekon Pagar Dalam adalah pecahan dari Bumi Lebu Tenumbang, dimana pada waktu itu Pekon Pagar Dalam di sebut Pekon Tuha, oleh pembagian dari Sultan Marga Tenumbang yang dulu disebut Pasirah, kemudian dipimpin suku Raja yang ada dipekon pagar dalam yang bernama Hamdan Gelar Raja Mantri sebagai pimpinan adat, kemudian setelah beliau wafat kepemimpinannya digantikan oleh keturunannya yang bernama Liswandi hingga sekarang.

3. Masyarakat Adat Saibatin

Sebelum peneliti menjelaskan tentang masyarakat adat Saibatin terlebih dahulu penulis menjelaskan arti masyarakat. Secara etimologi kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu “Syarikat”, pengertian ini adalah berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Jadi Masyarakat dipakai untuk menamakan pergaulan hidup manusia.

Saibatin berasal dari kata *Sai* dan *Batin*, *Sai* dalam bahasa Lampung artinya adalah satu dan *Batin* artinya adalah jiwa atau hati. Jadi kata Saibatin adalah satu jiwa atau satu hati antara pemimpin adat dengan masyarakatnya. Saibatin adalah sebutan gelar adat bagi pemimpin di daerah Lampung Pesisir yang menduduki sebagai kepala adat yang kepemimpinannya itu diwarisi secara turun temurun sejak dahulu kepada anak laki-laki tertua. Budaya suku Saibatin kedudukan adat hanya dapat diwariska melalui garis keturunan (Monarki). Kedudukan adatnya turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua, jika sang ayah keturunan Saibatin dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anakpun memegang tumpuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannyapun diakui. Bagi adat Saibatin, walaupun warga adatnya terus berkembang, namun kekuasaan adat tetap dipegang oleh pemimpin adat berdasarkan garis keturunan. Masyarakat adat yang terus berkembang, tergabung dalam

suatu lingkaran biasa disebut *jukkuan* dan ada juga yang tegabung dalam satuan *marga*.

Adat Saibatin berpegang teguh pada prinsip *piil penggiri* yaitu prinsip hidup mengenai harga diri, perilaku, yang dapat menjaga menegakan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa tetap dipertahankan. Seperti rasa malu dengan orang lain, rasa pantang menyerah serta rasa mudah tersinggung. sebutan Saibatin karena Masyarakat berkeinginan seorang pemimpin yang kaya, mampu, dan berwibawa. Maksud dari kata kaya adalah kaya hati, kaya ilmu (baik ilmu agama dan non agama) dan harta. Sedangkan kata mampu adalah mampu memimpin dengan baik dan mampu bersikap adil terhadap masyarakat. Dan kata berwibawa adalah orang yang mempunyai wibawa sehingga disegani dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh sebab itu pemimpin adat disebut dengan Saibatin.

Dari pengertian adat dan Saibatin diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Saibatin adalah orang yang mampu, bijaksana dalam mengambil keputusan baik di lingkungan keluarga sendiri atau dilingkungan adatnya, bila diadakan musyawarah dan mufakat, dan mengerti akan tata krama yang ada dalam adat dan ada dalam ajaran Islam. Dengan demikian, masyarakat adat Saibatin berarti masyarakat yang memiliki adat yang menjunjung tata krama, bijaksana dan mendahulukan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan adat.

Proses musyawarah atau pengambilan keputusan adat dalam masyarakat adat Saibatin di kenal dengan istilah *Himpun*. Adapun macam-macam dan urutan *himpun* diantaranya sebagai berikut: *himpun sang lamban* yaitu musyawarah antara keluarga, *himpun muakhi* yaitu musyawarah antara sanak saudara, *himpun sang pekon* yaitu musyawarah antara masyarakat yang berada di Pekon, dan *himpun marga* yaitu musyawarah antara tokoh adat Saibatin di Kalangan *marga*. Sedangkan proses musyawarah (*himpun*) di Pekon Pagar Dalam hanya sampai dengan *himpun sang pekon* saja. Karena *himpun sang marga* hanya terdapat tingkatan *Marga* saja.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Masyarakat Saibatin mayoritas beragama Islam, maka Sumber-sumber Hukum Adatnya bersumber kepada hukum Islam dan hukum Negara Pancasila dan UUD 1945, sedangkan sumber-sumber keadatannya bersumber kepada musyawarah, mufakat, se-ia dan se-kata antara kerabatnya.⁵

Di samping hal-hal tersebut di atas tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh tingkah laku dari hubungan orang perorangan, oleh karena itu hasil dari musyawarah mufakat adat biasanya disebut dengan istilah tata titi, yang mengatur hubungan antara orang perorangan dalam hubungan dengan masyarakat.⁶

⁵ Zahmi (Gelar Minak), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 4 April 2018.

⁶ Mizon (Kepala Bujang), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 4 April 2018.

C. Struktur Kepangkatan Adat Saibatin

kedudukannya di dalam masyarakat adat adalah sebagai ketua adat atau pemimpin adat. Gelar Saibatin tidak dapat dinaikan status adatnya walaupun memiliki potensi sebagai pemimpin apabila tidak memiliki garis keturunan saibatin. Pengangkatan saibatin harus dari keturunan saibatin juga, disamping keturunan setiap pengangkatan punyimbang adat harus dituakan. Karena itu tata-titi pengangkatan diatur sebagai berikut:

- a. Paksi Pak membentuk khua belas kebandakhan mengembangkan sesuai dengan keturunannya.
- b. Setiap kebandakhan mengembangkan Saibatin kampung sesuai dengan keturunannya.
- c. Setiap gelar adat membentuk pandai pangku sakha disesuaikan dengan keturunannya pula, sebagai musyawarah dan mufakat kerabatnya.

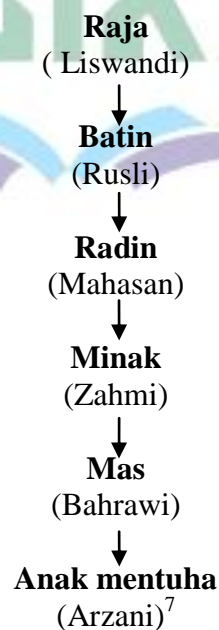
Struktur adat setiap komonitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komonitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat Pekon Pagar Dalam, pangkat tertinggi adalah bergelar Raja. Sedangkan struktur kepangkatan adat Saibatin Terdiri dari *Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas, Mas atau Inton*.

Kedudukan adat seseorang dalam struktur pemerintahan adat Saibatin dapat dilihat dan dibentuk dari seberapa banyak *jamma* (bawahan/anak buah) dari seseorang untuk mencapai *adok* (gelar adat) tertentu. Selain itu untuk menduduki struktur kepemimpinan adat Saibatin mempunyai kelipatan 4 (empat), setiap jenjang atau tingkatan adat sebelumnya harus mempunyai

minimal 4 pemapah gelar adat, seperti untuk bergelar *Sultan* sebelumnya harus membawahi minimal empat gelar *Raja*, begitu juga seterusnya untuk bergelar *Raja* harus membawahi minimal empat gelar *Batin*, untuk bergelar *Batin* harus membawahi minimal empat gelar *Radin*, untuk bergelar *Radin* harus membawahi minimal empat gelar *Minak*, untuk bergelar *Minak* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Kimas*, untuk bergelar *Kimas* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Mas* atau *Inton*.

Layaknya kepengurusan pada sebuah komunitas yang mempunyai struktur kepengurusan guna untuk mempermudah koordinasi, maka dalam kepemimpinan adat Lampung Saibatin di pekon Pagar Dalam juga terdapat struktur kepangkatan yaitu sebagai berikut:

Susunan Status Sosial Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam Yaitu Sebagai Berikut:



⁷ Liswandi (Gelar Raja Marga), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 2 April 2018.

D. Kreteria Calon Pemimpin Adat Saibatin

Masyarakat Lampung yang beradatkan Saibatin pada proses pelimpahan wewenang dan kekuasaannya ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi oleh calon Saibatin atau pemimpin adatnya. Kreteria calon pemimpin adatnya sebagai berikut:

a. Garis Keturunan

Calon pemimpin adat harus dari keturunan Saibatin sebelumnya, jadi di luar dari keturunan Saibatin tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi pemimpin adat.

b. Anak Laki-laki Pertama

Calon pemimpin adat harus anak laki-laki pertama atau tertua. Karena bagi masyarakat adat Saibatin anak laki-laki tertua adalah sangat penting terutama menyangkut hak waris, adat, maupun tanggung jawab dan dianggap orang yang paling bisa menjadi pelindung bagi keluarga, kerabat dan sanak saudara, sebab ia lebih dahulu mengalami dan pengalamannya pun jauh lebih banyak dibandingkan anak laki-laki berikutnya. Anak laki-laki pertama yang dimaksud disini adalah anak laki-laki yang tidak harus lahir pertama pada sebuah keluarga Saibatin. Contoh pada sebuah keluarga Saibatin mempunyai anak lima, anak pertama dan keduanya perempuan dan ketiga sampai kelima adalah laki-laki, maka yang menjadi calon pemimpin adat adalah anaknya yang lahir ketiga. Karena ia adalah anak laki-laki yang lahir pertama. Tetapi jika pada sebuah keluarga Saibatin tidak mempunyai anak laki-laki, maka gelar adat diserahkan kepada anak

menantu yang berstatus “*Semanda*”. *Semanda* dalam masyarakat Saibatin adalah berpindahnya hak dan kewajiban seseorang karena perkawinan, sementara jika pada sebuah keluarga Saibatin tidak mempunyai keturunan maka gelar adatnya diserahkan kepada keluarga terdekat yang masih keturunan Saibatin dan hal inipun harus berdasarkan musyawarah adat.

c. Islam

Karena masyarakat adat Saibatin semuanya adalah beragama Islam, maka pemimpin adat harus beragama Islam, jika calon pemimpin adat keluar dari agama Islam maka hak gelar adatnya secara otomatis hilang dan diserahkan kepada adiknya atau saudaranya yang lain.

d. Sudah Menikah.

Proses pelimpahan dan pemberian gelar adat pada masyarakat Saibatin dilaksanakan pada saat akad nikah dilangsungkan. Jadi calon pemimpin adat Saibatin adalah orang yang benar-benar sudah baliqh.⁸

E. Mekanisme Pengangkatan Adat Saibatin

Pemberian gelar pada masyarakat adat Saibatin khususnya di Pekon Pagar Dalam, dilaksanakan di bawah koordinator seorang yang begelar Sultan, kemudia Sultan mengadakan rapat 4 suku dibuat serta untuk menilai apakah seseorang tersebut sudah layak dan memenuhi sayarat untuk mendapatkan gelar adat. Kemudian setelah pemberian gelar adat selanjutnya Sultan akan mengeluarkan surat semacam SK pengangkatan dan pemberian gelar.

⁸ Liswandi (Gelar Raja Marga), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 2 April 2017.

Kesempatan untuk mewariskan atau kedudukan seseorang di dalam adat dilaksanakan pada acara *nayuh* atau pernikahan. Prosesi pemberian adok ini dihadiri oleh Saibatin yang bergelar Sultan beserta tokoh adat lainnya. Sebelum Pelaksanaan pengangkatan atau pemberian gelar adat dilaksanakan mulai pagi hari. Calon pemimpin adat terlebih dahulu didandani dipasangkan simbol-simbol adat, seperti baju adat dan ketupung agung. Calon pemimpin adat berangkat keluar dari rumah salah seorang tokoh adat adat, lalu pergi menjemput calon istrinya dengan menggunakan *alam gemiser* dan diiringi oleh rombongan keluarga, salah satu rumah tokoh adat yang juga telah ditentukan berdasarkan rapat adat.⁹

Setelah acara penjembutan selesai, maka kedua mempelai diarak mengelilingi *pekon* dengan menggunakan *alam gemiser* dipayungi dengan *payung agung*. *Payung agung* sendiri penggunaanya harus disesuaikan, sebab jika *Sultan* nya tidak mengiringi arak-arakan, maka *payung agung* tersebut harus dikuncupkan dan hanya dibawa berjalan saja. Di depan kedua mempelai terdapat juga *jambrang* yang telah dihiasi dengan rapi. *Jambrang* ini dibuat dari pohon pisang yang diambil setengah batang lalu dihiasi dengan kayu-kayu kecil yang diujungnya diberi telur dan uang, *jambrong* tersebut dibawa oleh empat orang.

Arak-arakan tersebut bertujuan memperkenalkan calon Saibatin kepada masyarakat dan merupakan tradisi dan pengembangan budaya masyarakat setempat. Jika arak-arakan mengelilingi *pekon* sudah selesai, maka kedua

⁹ Bahrawi (Gelar Mas), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 5 April 2017.

mempelai masuk ke *kelasa* guna melaksanakan akad nikah. Susunan duduk di bawah kelasa juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan, disebelah kanan kedua mempelai untuk tempatnya jajaran Saibatin, sebelah kiri untuk keluarga besar kedua mempelai dan di depan kedua mempelai mempelai penghulu dan wali nikah, Kedua mempelai dengan penghulu dibatasi oleh meja yang didandani dengan dandanan adat serta di atasnya disusun peralatan adat.

Jika semua persiapan sudah tersedia maka acara nikahpun dilaksanakan. Setelah acara pelaksanaan pernikahan selesai maka baru pemberian gelar dilaksanakan. Pemberian gelar adat ini di laksanakan dalam upacara yang lazim menurut adat diantara khalayak dengan penuh hikmat, dimulai oleh salah satu tokoh adat Saibatin ayag telah ditunjuk pada rapat adat sebelumnya, yang dimulai dengan membunyikan *canang* setelah itu dia menyampaikan sambutan atau *butetah*. *Butetah* adalah menyampaikan pesan adat kepada masyarakat dan serta pemberian gelar adat yang secara khusus dilaksanakan oleh tokoh adat yang ditugaskan.

Setelah pemberian gelar adat secara khusus terhadap mempelai laki-laki dan diteruskan dengan pemakaian baju kebesaran adat, maka kedua mempelai dimasukan kedalam rumah soibul hajat. Kedua mempelai atau pemimpin adat yang baru dinobatkan didudukan di atas *kasor singgasana* atau kasur adat, sementara tokoh adat adat dan keluarga besar kedua belah pihak menjadi pengiring kedua mempelai masuk kerumah yang telah ditentukan. Kasur disinggasana sendiri harus disesuaikan kepangkatan dari gelar adatnya.

Untuk jabatan sebagai Raja berjumlah dua belas lapis, Batin berjumlah lima lapis, Radin berjumlah tiga lapis, Minak berjumlah dua lapis, Mas berjumlah dua lapis, dan Anak mentuha berjumlah dua lapis, dan yang mengurus jumlah serta yang menghiasi kasur ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, yang berhak menghiasinya adalah istri para Saibatin dan untuk penggunaan simbol adat *alam geminser* hanya boleh digunakan oleh *Sultan, Dalom* dan *Raja* sementara jenjang adat di bawahnya tidak boleh mempergunakannya.

Pelaksanaan upacara adat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, semuanya dilaksanakan berdasarkan rapat adat yang sebelumnya telah dilaksanakan sekitar dua bulan sebelum acara dimulai dan dalam pelaksanaanyapun di bawah komando salah satu pemimpin adat yang telah ditunjuk pada rapat adat. Jadi pelimpahan wewenang kepada seseorang agar memudahkan dalam berkoordinasi.¹⁰

F. Peran Pemimpin Adat Saibatin

Layaknya sebuah kepemimpinan yang mempunyai hak dan kewajiban, tentunya dalam kepemimpinan adat Saibatin juga terdapat hal yang sama, terlihat dari peran pemimpin adat dalam setiap acara adat. Hak dan kewajiban tersebut adalah seperti hak untuk mendapatkan harta warisan adat dan hak memberikan keputusan adat. Hak untuk memberikan keputusan adat adalah hak untuk menentukan sikap jika dalam pelaksanaan upacara adat tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah disepakati.¹¹

¹⁰ Rusli (Gelar Batin), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 3 April 2017.

¹¹ Arzani (Gelar Anak Mentuha), wawancara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 6 April 2017.

Serta kewajiban untuk meneruskan atau melestarikan kebudayaan adat yang sudah, kewajiban mengkoordinasi kegiatan adat, kewajiban untuk melihat kekurangan yang belum ada atau belum terlengkapi dari hasil musyawarah adat dan menambah kekurangan yang belum ada dalam masalah keadaan tersebut, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ada hubungannya dengan masalah sosial.¹²



¹² Mahasan (Gelar Radin), wawan cara dengan penulis, Pekon Pagar Dalam, 7 April 2017.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Bentuk Kepemimpinan Adat Saibatin Di Pekon Pagar Dalam

Budaya suku Saibatin di Pekon Pagar Dalam kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan (Monarki). Jika sang ayah keturunan Saibatin dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anakpun memegang tumpuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannyapun diakui. Struktur kepemimpinan adat setiap komunitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komunitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat Pekon Pagar Dalam, pangkat adat tertinggi adalah bergelar Raja karena gelar Sultan hanya ada dalam cangkupan Marga. Sedangkan struktur kepangkatan adat Saibatin terdiri dari *Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas, Mas atau Inton*.

Proses pelimpahan wewenang dalam kepemimpinan adat Saibatin mempunyai ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisional yang menganut pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang berdasarkan garis keturunan. Jadi di luar dari keturunan Saibatin tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi pemimpin adat.

Kedudukan adat seseorang dalam struktur pemerintahan adat Saibatin dapat dilihat dan dibentuk dari seberapa banyak *jamma* (bawahan/anak buah) dari seseorang untuk mencapai *adok* (gelar adat) tertentu. Untuk mendapatkan

gelar adat harus memenuhi syarat-syarat seperti mempunyai garis keturunan Saibatin, anak laki-laki tertua, beragama Islam, sudah menikah atau baliqh. Selain itu untuk menduduki struktur kepemimpinan adat Saibatin mempunyai kelipatan 4 (empat), setiap jenjang atau tingkatan adat sebelumnya harus mempunyai minimal 4 pemapah gelar adat, seperti untuk bergelar *Sultan* sebelumnya harus membawahi minimal empat gelar *Raja*, begitu juga seterusnya untuk bergelar *Raja* harus membawahi minimal empat gelar *Batin*, untuk bergelar *Batin* harus membawahi minimal empat gelar *Radin*, untuk bergelar *Radin* harus membawahi minimal empat gelar *Minak*, untuk bergelar *Minak* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Kimas*, untuk bergelar *Kimas* sebelumnya harus membawahi empat gelar *Mas* atau *Inton*.

Sementara kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam untuk mendapatkan gelar adat juga harus memenuhi syarat-syarat seperti mempunyai garis keturunan Saibatin, anak laki-laki tertua, beragama Islam, sudah menikah atau baliqh. Akan tetapi Struktur kepangkatan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam belum mempunyai Kelipatan 4 (empat). Dari Uraian ini bahwa di Pekon Pagar Dalam terdapat penyimpangan dalam syarat untuk mendapatkan gelar adat.

Pemberian gelar pada masyarakat pemimpin adat Saibatin khususnya di Pekon Pagar Dalam, dilaksanakan di bawah koordinator seorang tokoh adat yang telah ditunjuk berdasarkan musyawarah adat. penunjukan ini bertujuan agar pelaksanaan *nayuh* berjalan dengan lancar dan tidak menyalahi aturan adat.

Adapun mekanisme pengangkatan atau pemberian gelar pemimpin adat adalah pada saat acara pernikahan (*nayuh*). Nayuh adalah kebudayaan adat Saibatin dalam proses penobatan atau pemberian gelar adat. Pelaksanaan upacara adat sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, semuanya dilaksanakan berdasarkan musyawarah atau rapat adat yang telah dilaksanakan beberapa bulan sebelum acara dimulai dan dalam pelaksanaanyapun di bawah komando salah satu tokoh adat yang telah ditunjuk pada rapat adat. Jadi pelimpahan wewenang kepada seseorang agar memudahkan dalam berkoordinasi.

Proses musyawarah atau pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Saibatin di kenal dengan istilah *Himpun*. Adapaun macam-macam dan urutan *himpun* diantaranya sebagai berikut: *himpun sang lamban* yaitu musyawarah antara keluarga, *himpun muakhi* yaitu musyawarah antara sanak saudara, *himpun sang pekon* yaitu musyawarah antara masyarakat yang berada di Pekon, dan *himpun marga* yaitu musyawarah antara tokoh adat Saibatin di Kalangan *marga*. Sedangkan proses musyawarah (*himpun*) di Pekon Pagar Dalam hanya sampai dengan *himpun sang pekon* saja. Karena *himpun sang marga* hanya terdapat tingkatan *Marga*.

Layaknya sebuah kepemimpinan yang mempunyai hak dan kewajiban, tentunya dalam kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam juga terdapat hal yang sama, terlihat dari peran pemimpin adat dalam setiap acara adat. Hak dan kewajiban tersebut adalah seperti hak untuk mendapatkan kedudukan adat dan hak memberikan keputusan adat. Hak untuk memberikan

keputusan adat adalah hak untuk menentukan sikap jika dalam pelaksanaan upacara adat tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah disepakati. Serta kewajiban untuk meneruskan atau melestarikan kebudayaan adat, kewajiban mengangkat punyimbang adat yang sudah layak menjadi pemimpin adat, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ada hubungannya dengan masalah sosial.

B. Kepemimpinan Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam Menurut Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah Persoalan pengangkatan pemimpin dianggap persoalan yang paling mendasar. Sebagaimana dimaklumi, Rosulullah tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantiannya itu dilakukan. Oleh sebab itu oleh sejarah Islam, dikenal dengan berbagai mekanisme penetapan kepala Negara (pemimpin). Dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun cara pengangkatan *Khulafaur Rasyidin* dijadikan rujukan umat Islam dan mencontohkan sikap persamaan, baik hak dan kewajiban, martabat serta kesempatan sebab dalam Islam kepemimpinan bukanlah dari golongan elit, melainkan semua muslim diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karenanya nilai-nilai musyawarah dalam Islam cukup dikedepankan sebab masa-masa setelahnya tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin banyak menggunakan ijtihad.

Kata kepemimpinan dalam fiqh siyasah yaitu Imamah atau Khalifah yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi Negara dan mengatur kemaslahatan hidup, sekelompok Ulama berpendapat status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.

Terkait dengan hal ini ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan: *Pertama*, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang ia miliki, dan perspektif Max Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan kepemimpinan pada prosedur hukum disebut otoritas hukum. *Kedua*, tipe kepemimpinan tradisioal yang didasarkan kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seorang pemimpin ditentukan adat kebiasaan lama yang dipraktikkan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu. *Ketiga*, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang.

Dalam mempelajari fiqh siyasah ada beberapa metode yang dipergunakan sebagai acuan, diantaranya ialah Metode Ijtihad, Pendekatan Qiyas, Pendekatan Ijma, Pendekatan Ihtisn, Pendekatan Mashlahah Mursalah, Pendekatan Istishhab, Pendekatan *Urf* (Hukum Adat). Dalam hal ini dikatakan dengan teori kepemimpinan, setiap pemimpin Islam selalu mengacu pada semua metode di atas dalam mengambil suatu kebijakan maupun dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mengacu pada beberapa

metode dan pendekatan di atas yang menjadi dasar atau landasan berfikir dan bertindak seorang pemimpin dalam Islam lebih kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

Islam Adalah Agama yang komprehensif. Allah turunkan di tengah-tengah manusia sebagai penyelamat bagi seluruh umat manusia dan memberi penjelasan tentang yang mana haq dan bhatil, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai tatanan ruang lingkup yang luas, menyeluruh, melingkupi segi-segi kehidupan manusia.

Mengenai pandangan mengenai kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam, Islam menetapkan bahwa kepemimpinan merupakan hak mutlak Allah SWT dan wajib ditegakkan berdasarkan ketentuan Allah. Hal ini merupakan isyarat bahwa segala persoalan yang terjadi ditengah-tengah umat pada dasarnya harus dicarikan solusi dan bukan solusi yang bertentangan dengan ketentuan Allah.

Seperti pada bab sebelumnya, bahwa dalam kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam bentuk kepemiminannya adalah sistem Monarki, dimana calon pemimpin adat harus berdasarkan keturunan, anak laki-laki pertama, beragama Islam dan sudah menikah, serta pada proses penobatan atau pemberian gelar adatnya dilaksanakan dengan acara yang cukup meriah yang disebut *mayuh*.

Sebagian ahli tafsir yang menyatakan bahwa syarat seorang pemimpin adalah mempunyai nasab Quraisy, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-

Mawardi bahwa calon pemimpin itu harus dari keturunan pemimpin sebelumnya (Quraisy), mendapat bantahan dari berbagai pihak. Sementara menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini, baginya calon pemimpin pada saat ini tidak harus dari golongan Quraisy ataupun dari keturunan pemimpin sebelumnya, karena syarat ini suatu masalah yang diperselisihkan, maka tidak boleh membuat statement pasti, apalagi masalah ini adalah lapangan ijtihad dan tidak boleh mutlak-mutlakan. Lebih lanjut menurut Ibn Khaldun, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan pemimpin itu harus dari golongan Quraisy, karena menurutnya Quraisy waktu itu merupakan suku yang kuat, tangguh dan terkemuka, mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh yang membuat mereka paling berwibawa untuk memelihara keutuhan dan persatuan umat Islam. Tetapi jika ada salah satu suku, sekelompok atau seorang saat ini yang bisa melebihi atau sama seperti kelompok Quraisy berhak juga menjadi pemimpin, karena bagi Ibn Khaldun syarat tersebut hanya merupakan simbolis belaka dan hak kepemimpinan bukanlah hak monopoli Quraisy dan harus adanya sikap persamaan hak. Bahkan dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegang dalam pemilihan pemimpin, namun pada pengangkatan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan rujukan Islam dalam pemimpin, walaupun dalam Al-Quran dan As Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melaksanakan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak menggunakan ijtihad.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut penulis bentuk kepemimpinan adat masyarakat Saibatin di Pekon Pagar Dalam mempunyai kesenjangan dengan kepemimpinan menurut fiqh siyasah, karena kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam termasuk kedalam sistem pemerintahan Monarki, dimana pemimpin tertinggi dapat naik tahta tanpa berdasarkan pilihan rakyat atau masyarakat melainkan melalui suksesi secara turun temurun, apalagi kekuasaan tertinggi dalam sistem Monari berada ditangan seorang Raja. kepemimpinan adat merupakan kepemimpinan yang tidak membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin atau punyimbang adat. Sebab dalam kepemimpinan Islam tidak ada keharusan calon pemimpin dari keturunan pemimpin sebelumnya, namun Islam juga tidak melarang untuk calon pemimpin itu boleh dari keturunan pemimpin sebelumnya. Karena kepemimpinan adat masyarakat Saibatin di Pekon Pagar Dalam dikelompokkan dalam bentuk stratifikasi sosial yang bersifat tertutup.

Anak laki-laki pertama, merujuk pada syarat seperti yang diajukan Al-Ghazali. Bahwa pemimpin itu harus laki-laki dewasa. Maka ada sedikit kesamaan, jika kewajiban itu dilihat dari jenis kelamin. Tetapi dalam syarat calon pemimpin adat Lampung Saibatin adalah anak laki-laki pertama yang berdasarkan nomor urut kelahiran dan tidak memberi ruang pada anak laki-laki sesudahnya, maka antara syarat kepemimpinan dalam kepemimpinan Islam terdapat perbedaan. Karena dalam kepemimpinan adat Lampung Saibatin harus berdasarkan nomor urut dan hanya jenis kelamin, sementara syarat dalam kepemimpinan Islam hanya pada batasan jenis kelamin.

Islam. Baik dalam kepemimpinan adat Saibatin maupun perspektif fiqh siyasah syarat mutlak untuk jadi pemimpin adalah beragama Islam. Namun dalam kepemimpinan adat Islam yang dimaksud adalah orang Islam yang masih keturunan pemimpin atau kepunyaimbangan adat, diluar keturuana Saibatin tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi pemimpin adat. Sementara dalam kepemimpinan perspektif fiqh siyasah, Islam yang dimaksud adalah seluruh orang Islam dibelahan bumi manapun boleh menjadi seorang pemimpin asalkan bisa memenuhi syarat dan mampu menjalankan amanah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosul-Nya.

Sudah menikah. Pemberian gelar adat dan pelimpahan kekuasaan serta wewenang pada kepemimpinan adat Saibatin adalah pada saat pelaksanaan pernikahan. Jadi jika calon pemimpin adat belum baliqh maka dia tidak mempunyai hak dan wewenang dalam kepemimpinan adat.

Merajuk pada syarat bahwa laki-laki dewasa disini adalah seseorang yang telah bisa membedakan aturan yang hak dan yang bathil. Jadi menurut peneliti syarat baliqh baik yang disyaratkan oleh pemimpin adat maupun yang disyaratkan dalam Islam terdapat kesamaan dan tidak adanya pertentangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya tentang Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah dan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk Kepemimpinan Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam

Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku Saibatin, hanya ada satu Raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Saibatin adalah sebutan gelar adat bagi pemimpin di daerah Lampung Pesisir yang menduduki sebagai kepala adat yang kepemimpinannya itu diwarisi secara turun temurun sejak dahulu kepada anak laki-laki tertua dari keturunan dari pihak laki-laki. Budaya suku Saibatin kedudukan adat hanya dapat diwariska melalui garis keturunan (monarki). Jika sang ayah keturunan Saibatin dan mempunyai kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu, maka sang anakpun memegang tumpuk kepemimpinan atas wilayah tersebut sepeninggalan ayahnya dan hak-hak keturunannyapun diakui. Struktur kepemimpinan adat setiap komonitas berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah komonitas dan sejarah awal terbentuknya masyarakat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat Pekon Pagar Dalam, pangkat adat tertinggi adalah bergelar Raja. Sedangkan sruktur kepangkatan adat Saibatin terdiri dari *Sultan atau bisa disebut juga Pangiran atau Dalom, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas, Mas, Inton.*

Proses pelimpahan wewenang dalam kepemimpinan adat Saibatin mempunyai ciri khas tersendiri, karena kepemimpinan adat adalah kepemimpinan tradisional yang menganut pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang berdasarkan garis keturunan. Jadi di luar dari keturunan Saibatin tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi pemimpin adat.

2. Kepemimpinan Adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam Menurut fiqh siyasah

Kepemimpinan adat Saibatin di Pekon Pagar Dalam terdapat beberapa kesenjangan dengan Kepemimpinan Perspektif Fiqh Siyasah, karena kepemimpinan adat Saibatin termasuk kedalam sistem pemerintahan Monarki, dimana pemimpin tertinggi dapat naik tahta tanpa berdasarkan pilihan rakyat atau masyarakat melainkan melalui suksesi secara turun temurun, apalagi kekuasaan tertinggi dalam sistem Monarki berada ditangan seorang raja. kepemimpinan adat merupakan kepemimpinan yang tidak membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin adat. Sebab dalam kepemimpinan Islam tidak ada keharusan calon pemimpin dari keturunan pemimpin sebelumnya, namun Islam juga tidak melarang untuk calon pemimpin itu boleh dari keturunan pemimpin sebelumnya. Karena kepemimpinan adat masyarakat Saibatin di pekon pagar dalam dikelompokkan dalam bentuk stratifikasi sosial yang bersifat tertutup.

B. Saran

1. Melestarikan adat istiadat secara turun temurun memang sudah menjadi bagian dari kebiasaan, pemimpin adat harus menjadikan Agama sebagai landasan hukum dalam mengaktualisasikan kegiatan kebudayaan Lampung Saibatin supaya antara Agama dan Kebudayaan tidak saling bertentangan dan pemimpin adat juga harus selalu bekerja sama baik dengan tokoh-tokoh adat lainnya maupun dengan aparat desa sehingga dalam menjaga pelestarian adat yang berlandaskan agama bisa tercapai.
2. Diperlukannya kerja sama semua pihak untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam gelar adat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang untuk keperluan-keperluan individu atau kelompok dan juga diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjaga kelestarian adat untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat dikarenakan perbedaan dalam kedudukan dalam adat.
3. Kepada para Saibatin yang ada di Pekon Pagar Dalam agar memperbaiki lagi struktur kepangkatan adatnya karena dalam adat Saibatin dalam struktur kepangkatannya mempunyai kelipatan empat atau harus minimal mempunyai empat pemapah gelar adat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Djiailani, *Perjuangan Idiologi Islam Indonesia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afifuddin Muhajir, *fiqh Negara: Upaya Mendialaogkan Ketata Negaraan Islam*.yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Ahmad Sofyan, *Islam On Lidearship*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006
- Sunindhia dan Ninik Widyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*Jakarta:PT. Bina Aksara, 1988.
- Amiruddi dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- As-Suwaitan, Thariq Muhammad dan Faishal Umar Basyarahil,*Melahirkan Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Gema Insane Press, 2005.
- Beni Ahmad Seabani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhamad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung:Cv Pustaka Setia, 2005.
- , *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintas Sejarah PolitikIslam Sejak Muhammad SAW Hingga Al Khulala Ar Rasyidun*. Cet-kedua. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Dedy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Surabaya: Pajar Mulya, 2012.
- Dzazuli,*Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Frenki, *Nilai-nilai Ketatanegaraan Islam dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Hilman Adi Kusuma Dkk, *Adat Masyarakat Lampung*. Kanwil Dekdikbuk Propinsi Lampung.

<http://pengertian-pengertian-info-blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dinamika>, akses minggu 31-01-2016.

<http://fikhafriscilia/malahayati.ac.id//ada-dimasyarakat-lampungsaibatin>. akses 27 desember, 2015.

Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Maha Siswa*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016

Imam Ahmad Bin Hambal, Mushab Imam Ahmad Bin Hambal, Juz II, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Musdah mulia, *Negara Islam; pemikiran politik Husain haikal* Jakarta: Paramadina, 2001.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Qisthi Pers, 2015.

Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Angkasa, 1995.

-----, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Kartini Kartano, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Manadr Maju, 1996.

-----, *Pimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali, 1983.

-----, Kartini kartono, *pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali press, 1998.

Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995.

Monografi Pekon Pagar Dalam, Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Tahun 2017

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; kontekstualisasidoktrin politik islam*. Indonesia: Prenadamedia grop, 2014.

Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husaen Haykal*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Ngalim Purwanto Dkk, *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara, 1994.

Sabarudin Sa, *Lampung Pepadun dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.

Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

Sayuti Pulangan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineck Cipta, 2006.

Surahman Amin, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Alqur'an*, *Jurnal Study Al-Quran*, Vol1 No 1. Oktober 2015.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Riberu, J., *Dasar-Dasar Kepemimpinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005.

Veithzal Rivai, *Kiat memimpin abad ke-21*. Jakarta: Grafindo, 2004.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011, Cet-Ketiga.

